

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan atau laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan manajemen laba terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan.

Suripto (1999) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dengan menggunakan sampel 68 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1995. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu size, rasio ungkitan (leverage), rasio likuiditas, basis perusahaan, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas, dan kelompok industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan masih rendah, tetapi variasinya bersifat sistemik. Variabel size dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya secara statistik signifikan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan. Dalam penelitian diperoleh variabel rasio leverage, rasio likuiditas, basis perusahaan, waktu terdaftar, dan kelompok industri tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Naim dan Rakhman (2000) menguji hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur modal perusahaan dan tipe kepemilikan perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio ungkitan secara signifikan dan positif berkaitan dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Tipe kepemilikan saham secara lemah berkaitan dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Marwata (2001) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara karakteristik perusahaan dengan kualitas pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitas pengungkapan sukarela perusahaan publik sebagai variabel terikat dan karakteristik perusahaan yang mencakup size perusahaan, basis perusahaan, rasio ungkitan, rasio likuiditas, umur perusahaan, dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya, pemilikan publik, dan pemilikan asing sebagai variabel bebas. Dengan menggunakan alat uji analisis Regresi Linier Berganda, penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pengungkapan sukarela berhubungan positif dengan size perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya. Variabel rasio ungkitan, likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan ditemukan tidak berhubungan dengan kualitas pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2001) bertujuan mengkaji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dan bersifat matematis dalam hal keluasan pengungkapan wajib dan sukarela perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Jakarta. Dengan menggunakan analisis Regresi Berganda, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sistematis mengenai tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan tahun 1999 di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kelengkapan pengungkapan wajib adalah size perusahaan, status perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin, dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Sedangkan tingkat pengungkapan sukarela dipengaruhi variabel di atas kecuali jenis perusahaan. Tingkat likuiditas dan leverage tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004) bertujuan menguji apakah terdapat pengaruh dari leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada berbagai industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitian ini, rasio leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar, dan umur perusahaan sebagai variabel bebas dan kelengkapan laporan keuangan sebagai variabel terikat. Dengan menggunakan alat uji analisis Regresi Berganda, penelitian ini menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar, dan umur perusahaan mampu mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan secara parsial, hanya

variabel leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi kepemilikan saham publik yang mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan pada industri manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Leony Lovancy Trisanti (2012) bertujuan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010 dengan karakteristik perusahaan. Dengan menggunakan analisis Regresi Berganda, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bersama-sama rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, dan proporsi kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. Secara parsial, hanya variabel rasio profitabilitas, proporsi kepemilikan saham oleh publik dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sriptoto (1999)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan	Size, rasio ungkitan (leverage), rasio likuiditas, basis perusahaan, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas, dan kelompok industry	Size dan penerbitan sekuritas secara statistik signifikan mempengaruhi; sedangkan rasio leverage, rasio likuiditas, basis perusahaan, waktu terdaftar, dan kelompok industry tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Naim dan Rakhman (2000)	Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal Perusahaan dan Tipe Kepemilikan perusahaan	Rasio ungkitan dan tipe kepemilikan saham perusahaan	Rasio ungkitan secara signifikan dan positif berkaitan dengan kelengkapan pengungkapan; tipe kepemilikan saham berkaitan secara lemah
3.	Marwata (2001)	Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	Ukuran perusahaan, penerbitan sekuritas, leverage, likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan	Ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas berpengaruh signifikan; sedangkan leverage, likuiditas, basis perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan ditemukan tidak berpengaruh
4.	Fitriani (2001)	Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Size perusahaan, status perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin, dan ukuran Kantor Akuntan Publik	Size perusahaan, status perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin, dan ukuran KAP mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib; sedangkan tingkat pengungkapan sukarela dipengaruhi variable tersebut

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				kecuali jenis perusahaan; tingkat likuiditas dan leverage tidak mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.
5.	Simanjuntak dan Widiastuti (2004)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor luar, dan umur perusahaan	Secara bersama-sama variabel tersebut mempengaruhi kelengkapan; secara parsial, hanya leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi kelengkapan pengungkapan kepemilikan saham publik yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
6.	Leony Lovancy Trisanti (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010)	Rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham publik	Secara bersama-sama rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan manufaktur.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi. Menurut Hendriksen (2002:429) “pengungkapan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk pengoperasian optimal pasar modal yang efisien”. Wolk dan Tearney (1997) dalam Marwata (2001:54) menyatakan pengungkapan mencakup penyediaan informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun yang secara sukarela dilakukan perusahaan, yang berupa laporan keuangan, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi pada tahun yang akan datang, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup pengungkapan menurut segmen dan informasi lainnya di luar harga perolehan.

Pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan juga tidak menutupi atau menyembunyikan informasi-informasi tersebut. Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Tujuan pengungkapan yang lengkap atas laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan agar laporan keuangan yang

dihasilkan tidak menyesatkan. Beberapa di antara pemakai laporan keuangan memerlukan dan berhak memperoleh informasi tambahan selain yang tercakup dalam laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan akan dapat diinterpretasikan secara tepat, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan pihak-pihak pengguna informasi, hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.

Semakin lengkap pengungkapan yang dilakukan, maka laporan keuangan perusahaan akan semakin handal (*reliabel*). Oleh karena itu, suatu perusahaan sangat penting melakukan pengungkapan. Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan tahunan sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada pemegang saham. Laporan tahunan (*annual report*) merupakan laporan yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan setiap setahun sekali yang berisi informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang berguna bagi para pemegang saham untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tersebut. Laporan keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Al Qur'an adalah menyempurnakan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٦﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Laporan keuangan ini wajib diaudit oleh auditor independen sebagai wujud dari transparansi keuangan perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Laporan non-keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi laporan manajemen yang berisi informasi penting mengenai perusahaan seperti laporan dewan komisaris, laporan direksi, kinerja perusahaan selama satu periode, profil perusahaan, strategi perusahaan, prospek perusahaan, dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Informasi yang dimuat dalam laporan tahunan ini lebih dikenal dengan istilah pengungkapan laporan tahunan (*annual report disclosure*).

Banyaknya informasi yang harus diungkapkan tidak hanya bergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Menurut Hendriksen (2002:433) pengungkapan secara umum memiliki tiga konsep yaitu:

a. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Memadai)

Pengungkapan memadai menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang sejalan dengan tujuan negatif membuat laporan tersebut tidak menyesatkan.

b. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama pada semua calon pembaca.

c. *Full Disclosure* (Pengungkapan Lengkap)

Pengungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan.

“Tujuan pengungkapan informasi yang positif adalah menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya”. (Hendriksen, 2002:433)

Kelengkapan dan transparansi pengungkapan laporan keuangan sangat penting karena itu sendiri merupakan sumber utama informasi yang disampaikan oleh manajer. Pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

b. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Setiap perusahaan memiliki kebebasan yang berbeda-beda untuk memilih jenis informasi yang akan diungkapkan. (Naim dan Rakhman, 2000:93)

Dalam pandangan Islam, penyajian laporan keuangan tidak boleh ada unsur penipuan atau adanya penyembunyian atas informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan terjadi jika salah satu pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam Al-Quran dijelaskan harus mengukur secara pasti tidak ada unsur penipuan dan juga tidak ditambahi atau dikurangi, ayat yang menjelaskan antara lain surat Asy-Syuara' ayat 181-183 (Ibrahim, 2010: 110):

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syuara’: 181-183)

2.2.1.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam

Menurut Harahap (2004:182-284) nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam surat Al-Baqarah ayat 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang

sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai syari'ah). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap akuntansi modern menuju pada akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. *Prinsip Kebenaran*

Kebenaran dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Akram Khan (Harahap, 2004:184) merumuskan beberapa sifat akuntansi islam sebagai berikut: a) penentuan laba rugi yang tepat; b) mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan; c) ketaatan kepada syariat Islam; d) keterikatan pada keadilan; e) melaporkan dengan baik; f) perubahan dalam praktik akuntansi.

2.2.1.2 Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun hendaknya meliputi: laporan laba/rugi, laba ditahan, neraca, sumber dan penggunaan dana, juga laporan khusus mengenai dana zakat. Zakat dalam konsep akuntansi Islam merupakan pungutan wajib dalam bentuk uang atau harta yang diambilkan dari pemilik untuk diberikan kepada para fakir-miskin dan untuk kegiatan sosial tanpa mengharapkan penghasilan. Laporan keuangan yang disusun hendaknya memenuhi kualifikasi informasi sebagai berikut:

1. Mengungkapkan kebenaran dari suatu informasi

Sebagai suatu proses pencatatan yang akan menyajikan informasi keuangan, akuntansi harus dapat mengungkapkan kebenaran sesuai bukti-bukti yang sah baik secara akuntansi maupun Islam. Dalam surat Al Baqarah ayat 42 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahuinya (QS Al Baqarah: 42).

2. Informasi yang disajikan harus mengandung keadilan

Informasi yang disediakan melalui proses akuntansi harus dapat mengungkapkan kenyataan secara adil. Artinya akuntansi tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang akan menguntungkan pihak pembuat laporan tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (*generally accepted principles*). Oleh karena itu sikap independensi sangat diperlukan dalam penyajian informasi. Sehubungan dengan hal tersebut Allah SWT telah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran” (QS An Nahl: 90)

Penyajian secara lengkap salah satu kualitas informasi yang disyaratkan dalam pengambilan keputusan adalah tentang kelengkapan informasi tersebut. Seberapa banyak kerugian akan terjadi akibat dari penyajian informasi yang tidak lengkap ini, disamping dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kesalahpahaman ataupun keputusan yang salah.

3. Penyajian dengan tepat waktu

Informasi yang benar, adil dan lengkap tidak akan mempunyai manfaat dalam pengambilan keputusan apabila disajikan tidak tepat pada waktunya sehingga hanya akan menjadi kadaluwarsa. Ketepatan waktu ini sangat dihargai dalam Islam, bukan hanya pada penyampaian informasi tetapi meliputi seluruh aktivitas yang dilakukannya. Dalam surat Al 'Ashr ayat: 1-3 sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ

وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS Al 'Ashr: 1-3)

2.2.2 Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan unsur-unsur tertentu dalam perusahaan yang dapat mewakili dalam penilaian perusahaan tersebut. Karakteristik perusahaan mendapat perhatian penting dalam penelitian karena bertitik tolak dari pemikiran bahwa sejauh mana pengungkapan laporan keuangan

oleh perusahaan sangat tergantung pada perbandingan antara biaya dan manfaat pengungkapan tersebut, dan perbandingan biaya-manfaat tersebut akan sangat ditentukan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari perusahaan yang bersangkutan (Suripto, 1999:85). *Trade off* antara biaya dan manfaat pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh faktor kondisi diri perusahaan (karakteristik perusahaan), sehingga akan mengakibatkan perbedaan pengungkapan antar perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan akan menentukan sejauh mana pengungkapan sukarela dilakukan, sehingga dapat diketahui lebih besar biaya atau manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut. Menurut Wallace et. al (1994) dan Cooke (1989) dalam Trisanti (2012:33-34) menggunakan karakteristik perusahaan yang dianggap sebagai proksi potensial untuk kelengkapan pengungkapan sukarela, dimana karakteristik perusahaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Variabel yang berkaitan dengan struktur (*Structure-Related Variable*)

Variabel yang berkaitan dengan struktur dianggap cenderung stabil dan konstan sepanjang waktu, yang termasuk variabel ini yaitu ukuran perusahaan dan tingkat leverage.

2. Variabel yang berkaitan dengan kinerja (*Performance-Related Variable*)

Variabel kinerja merupakan variabel yang akan berbeda pada waktu-waktu tertentu. Selain itu variabel ini mewakili informasi yang mungkin relevan bagi pengguna informasi akuntansi. Variabel yang termasuk

variabel ini yaitu *rasio profitabilitas (return on asset)* dan *rasio likuiditas (current ratio)*.

3. Variabel yang berkaitan dengan pasar (*Market-Related Variable*)

Variabel pasar dapat spesifik terhadap periode waktu ataupun relatif stabil dari waktu ke waktu. Variabel-variabel ini dapat dibawah ataupun diluar kendali perusahaan. Variabel ini dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, biasanya variabel yang berhubungan dengan pasar bersifat dikotomis, yaitu variabel dikelompokkan menjadi dua nilai. Contohnya seperti jenis industri dan status perusahaan. Sedangkan untuk yang bersifat kualitatif contohnya seperti proporsi pemegang saham dan umur perusahaan (Trisanti, 2012:33-34).

2.2.3 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Kreditur jangka pendek lebih memperhatikan prospek perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kreditur ini lebih tertarik pada aliran kas dan manajemen modal kerja dibanding dengan besar laba akuntansi yang dilaporkan perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel

Perusahaan yang likuiditasnya baik cenderung lebih berani mengungkapkan informasi lebih banyak. Hal itu berdasarkan pada perusahaan yang likuiditasnya tinggi berarti kondisi keuangannya juga baik, sehingga jika informasi itu diketahui oleh publik maka akan menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus pula. Rasio yang digunakan sebagai indikator pengukuran dalam penelitian ini adalah rasio lancar (*current ratio*) seperti yang digunakan dalam penelitian Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:45). “Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.” (Harahap, 2008:301)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Kajian islam tentang kewajiban melunasi hutang, dimana jika pihak berhutang tidak melunasi hutangnya maka Allah menjadikan pihak berhutang sebagai pencuri. Sehingga pihak berhutang harus melunasi hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hadits yang menjelaskan tentang keengganan membayar hutang dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّبَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shohih)

2.2.4 Rasio Leverage

“Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang.” (Harahap, 2008:306)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Trisanti (2012:36) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi maka menanggung biaya pengawasan yang tinggi pula. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif.

Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001:78) tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi lebih secara sukarela. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang mempunyai proporsi kewajiban (hutang) lebih banyak dalam struktur kepemilikannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Semakin tinggi leverage perusahaan, semakin besar pula biaya agensinya, atau dengan kata lain semakin

besar kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan manajer. Semakin besar proporsi hutang dalam struktur modal perusahaan, semakin besar pula biaya agensinya (Suripto, 1999:52). Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang dengan melakukan pengungkapan sukarela.

Rasio leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) seperti yang digunakan dalam penelitian (Trisanti, 2012:37). Rasio ini membandingkan total kewajiban (hutang) terhadap ekuitas. Rasio ini membandingkan pendanaan yang besar dari pinjaman dan investasi ekuitas. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang.

$$\text{Rasio Leverage (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2.5 Rasio Profitabilitas

“Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio.” (Harahap, 2008:304)

Singvi dan Desai (1971) dalam Tristanti (2012:37) menyatakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Tristanti (2012:37) memberikan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan pengungkapan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan (sukarela) ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela karena ingin menunjukkan kepada publik dan stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan secara sukarela lebih banyak untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas ini, yaitu *rasio net profit margin*, *return on asset (ROA)*, *return on equity (ROE)*. Dalam penelitian ini menggunakan *return on asset* untuk mengukur rasio profitabilitasnya, seperti yang digunakan dalam penelitian (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:354). Rasio ini menunjukkan laba bersih yang diperoleh perusahaan jika diukur dari nilai asetnya. *Return on assets* mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba.

Return on assets yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih lengkap. Hal ini disebabkan karena manajemen ingin meyakinkan bahwa perusahaan dalam posisi keuangan yang kuat dan menunjukkan kinerja perusahaan juga bagus. Semakin tinggi *return on assets*, semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangannya.

$$\text{Rasio profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih (setelah pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan struktur kepemilikannya. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi secara sukarela lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Terdapat beberapa argumen yang dapat menjelaskan mengapa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Perusahaan besar berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela yang memadai dalam laporan tahunannya, misalnya kemudahan untuk memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari pasar modal. Sedangkan perusahaan kecil umumnya sulit untuk mendapatkan dana dari pasar

modal, mengingat pembatasan ukuran aset bila terjun ke bursa, sehingga perusahaan kecil tidak dapat menikmati keuntungan dari pengungkapan informasi yang memadai. Perusahaan besar mungkin juga lebih kompleks dan mempunyai dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil. Variabel ukuran (*size*) merupakan variabel yang secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pada penelitian-penelitian sebelumnya. (Trisanti,2012:39)

Menurut Meek et. al. (1995) dalam Fitriani (2001:84), kemampuan perusahaan besar untuk merekrut karyawan yang ahli serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis membuat perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan secara sukarela yang lebih luas daripada perusahaan kecil. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain. Singvi dan Desai (1971) dalam Fitriani (2001:92) mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar. Jensen dan Meckling dalam Marwata (2001:90) menyatakan teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi sukarela lebih banyak sebagai upaya mengurangi biaya keagenan tersebut.

Untuk mengukur variabel ukuran perusahaan ini, proksi yang digunakan adalah total aset. Hal ini seperti yang digunakan dalam penelitian (Fitriani, 2001:94) yang membuktikan bahwa total aset lebih menunjukkan ukuran

perusahaan dibanding dengan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset dari perusahaan sampel.

Ukuran perusahaan (Ln) = Total Aset

2.2.7 Status Perusahaan

Perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki pemegang saham yang berbeda pula, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang dilakukan pun berbeda. Menurut Trisanti (2012:41) afiliasi suatu perusahaan dengan perusahaan asing atau multinasional mungkin akan memiliki kualitas pengungkapan yang lebih tinggi daripada yang tidak berafiliasi. Dengan kata lain, kemungkinan Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan pengungkapan sukarela yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan domestik. Ada beberapa alasan mengenai pernyataan tersebut.

Pertama, perusahaan berstatus asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya di luar negeri. Kedua, perusahaan berstatus asing mungkin mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, analis, dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berstatus asing (PMA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini, status

perusahaan diukur dengan variabel dummy seperti pada penelitian (Trisanti, 2012:42). Status perusahaan dalam penelitian ini dibedakan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan perusahaan asing (PMA). Untuk perusahaan yang berstatus domestik (PMDN) maka diberi nilai 0 dan perusahaan berstatus asing (PMA) diberi nilai 1.

Status perusahaan : PMDN = 0, PMA = 1

2.2.8 Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan di bursa. Umur perusahaan adalah pengelompokan perusahaan berdasarkan kriteria lamanya perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Menurut Marwata (2001:93), umur perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman yang lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan.

Menurut teori ini, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Semakin lama perusahaan maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi

perusahaan dalam bertahan hidup. Selain itu, menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima masyarakat. Sehingga semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan semakin mengungkapkan informasi sukarelanya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat. Perusahaan yang lama berdiri tentunya telah berkembang menjadi perusahaan besar dan memiliki banyak pemegang saham. Sehingga banyak pihak yang membutuhkan informasi lebih dari perusahaan. Perusahaan berkembang seiring kondisi dalam dunia usaha dan para akuntannya belajar lebih banyak masalah pertumbuhan. Akibatnya perusahaan mapan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih terbuka. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih menyadari pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini, pengukuran umur perusahaan sama seperti pengukuran yang digunakan dalam penelitian (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:357) yaitu diukur dengan lamanya waktu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak listing sampai tahun 2011 yang merupakan periode penelitian.

Umur perusahaan: tahun listing sampai dengan tahun 2011 (Periode penelitian tahun 2008-2011)

2.2.9 Proporsi Kepemilikan Saham Publik

Simanjuntak dan Widiastuti (2004,355) menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Proporsi kepemilikan saham publik mewakili persentase saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan saham perusahaan, perusahaan diekspektasikan akan mengungkapkan informasi sukarela lebih banyak yang bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan. Naim dan Rakhman (2000:67) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak juga detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin lengkap (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:355). Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara sukarela lebih banyak dalam laporan tahunannya.

Dengan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik khususnya investor yang telah membeli saham perusahaan serta pihak-pihak lainnya (*stakeholders*). Penjualan saham kepada publik membawa konsekuensi berkurangnya kontrol pemegang saham sendiri terhadap perusahaan. Semakin besar persentase saham yang dilepas, semakin besar pula kontrol publik terhadap kebijakan perusahaan. Sehingga publik memerlukan pengungkapan informasi sukarela lebih banyak dari perusahaan yang bersangkutan untuk memantau perkembangan yang ada. Dalam penelitian ini,

proporsi kepemilikan saham publik diukur seperti pada penelitian (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:355) yaitu dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dengan jumlah total saham perusahaan yang beredar.

$$\text{Proporsi kepemilikan saham publik} = \frac{\text{Jumlah saham publik}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.10 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Fitriani (2001:490) hubungan keagenan muncul ketika principal bekerja dengan agent, dimana principal akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan wewenang dan kebijakan pembuatan keputusan kepada agent. Aljifri (2007:86) juga mengemukakan pernyataan yang sama bahwa teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham. Pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Agent diwajibkan memberikan laporan periodik pada principal tentang usaha yang dijalankannya. Principal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:360).

Teori agensi mengasumsikan bahwa individu bertindak memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agent untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya dan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya hal tersebut, maka agent memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada principal agar tidak terjadi asimetri informasi. Dasar perlunya praktek pengungkapan informasi oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam teori agensi. Dengan adanya hubungan antara principal dan agent tersebut dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Hal itu disebabkan agent memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibanding principal. Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer terjadi karena manajer tidak memiliki saham pada perusahaan, sehingga segala kebijakan yang dibuat, baik hal itu menguntungkan maupun merugikan akan berdampak pada pemegang saham dan bukannya berdampak pada manajer. Pemegang saham tentunya menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Dalam kenyataannya, yang sering terjadi manajer perusahaan justru bertindak memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri dengan pembelian fasilitas yang berlebihan, menginvestasikan laba ditahan pada proyek yang kurang menguntungkan, dan penjualan aset perusahaan dengan harga rendah. Konflik

kepentingan antara manajer dengan pemilik atau pemegang saham menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Keadaan ini menimbulkan masalah keagenan dimana masalah ini menimbulkan biaya untuk mengatasinya yang disebut biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Algharaballi (2008:255), biaya agensi terdiri dari biaya pengawasan oleh principal (*monitoring cost*), biaya perikatan/kontrak oleh agent (*contracting cost*), dan biaya politis.

2.2.11 Manajemen Laba dalam Teori Akuntansi Positif

Scott (2006: 344) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut: manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Manajemen laba menurut Mulford dan Comiskey (2002) dalam Aljifri (2007:80) merupakan *financial numbers game* (permainan angka-angka keuangan) yang dilakukan melalui *creative accounting practises* akibat adanya kelonggaran *flexibility principles* yang dikeluarkan oleh GAAP (General Accepted Accounting Principal).

Konsep *Earning Management* dapat dimulai dari pendekatan agensi dan *signaling theory*. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa praktik

earning management dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan agen (manajemen) dan principal (pemilik) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Teori sinyal (*signaling theory*) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sinyal apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak. Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor.

Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menggunakan informasi sebagai usaha untuk memaksimalkan kepentingannya. Aktivitas laba dapat terjadi tiga faktor yaitu dengan cara: pemanfaatan transaksi akrual, perubahan metoda akuntansi, dan penerapan suatu kebijakan. Scott (2006:346-355) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Program Bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*)

Penelitian Healy (1985) membuktikan bahwa kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat memaksimumkan besarnya bonus yang akan diperoleh. Laba suatu periode akuntansi yang lebih rendah dari target laba merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi

laba yang dilaporkan dalam suatu periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya.

b. Hipotesis Perjanjian Utang (*The Debt Covenant Hypothesis*)

Salah satu persyaratan dalam pemberian kredit seringkali mencakup kesediaan debitur untuk mempertahankan tingkat rasio modal kerja minimal, *rasio debt to equity* minimal, maksimum pemberian deviden ke pemegang saham atau batasan lain yang umumnya dikaitkan dengan data akuntansi. Pelanggaran terhadap batasan-batasan yang termuat dalam kontrak kredit ini merupakan hal yang menakutkan bagi manajemen. Oleh karena itu, kondisi keuangan yang menyebabkan perusahaan berada dalam posisi nyaris melanggar perjanjian kredit dapat menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka meminimalkan probabilitas pelanggaran perjanjian kredit.

c. Hipotesis Politis (*The Political Cost Hypothesis*)

Fluktuasi yang besar dalam laba mungkin menarik perhatian pembuat peraturan (*regulator*), fluktuasi naik yang besar atas laba dapat dipandang sebagai sinyal krisis dan menyebabkan *regulator* bertindak. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba dibandingkan perusahaan kecil.

2.2.11.1 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2006:354) pola-pola manajemen laba, antara lain :

1. *Taking A Bath*

Taking a bath sering disebut *big bath* dan dilakukan agar laba pada periode berikutnya menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena manajemen menghapus beberapa aktiva dan membebaskan perkiraan-perkiraan mendatang pada periode sekarang.

2. *Income Maximation*

Income maximation dilakukan agar laba pada periode sekarang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

3. *Income Minimation*

Income minimation dilakukan agar laba periode sekarang lebih rendah dari yang seharusnya.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan perubahan atau manipulasi laba secara *smooth* atau lembut yang diukur dengan Indeks Eckel. Proksi dari *income smoothing* yang menggunakan Indeks Eckel berbeda dengan proksi manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. *Income smoothing* (perataan laba) meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode sama dengan jumlah laba periode sebelumnya.

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua perusahaan dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, peng-rusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terakumulasi pada perusahaan sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Seperti dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana menjaga amanah agar tidak melipatgandakan keuntungan atau melakukan manajemen laba:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Al-Anfal: 27)

Ayat di atas menjelaskan dimana bahwa manajer adalah orang yang dipercayai oleh principal untuk menjalankan usaha di perusahaan yang dijalankan. Sehingga pihak manajer tidak boleh menyembunyikan informasi-informasi yang penting untuk mengambil keputusan pihak principal. Jika pihak manajer sengaja menyembunyikan informasi atau data-data yang seharusnya diungkapkan maka itu sangat merugikan pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh manajer.

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan dalam prosedur transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi kontraktual atau menyesatkan pihak *stakeholders* dalam

pengambilan keputusan mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Healy dan Palepu, 2000:211). Manajemen laba dapat diukur melalui *discretionary accruals* (DAC) yang dihitung dengan cara menselisihkan *total accruals* (TAC) dan *nondiscretionary accruals* (NDAC). *Discretionary accruals* dihitung dengan menggunakan model *Jones*. Model *Jones* dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow *et al.*, (1995: 46). Model perhitungan sebagai berikut:

$$TAC_t = NI_t - CFO_t \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana TAC_t adalah *total accruals* pada periode ke-t, NI_t adalah *net income* (laba bersih sebelum pajak) yang juga *income before extraordinary items* pada periode ke-t dan CFO_t adalah *cash flow from operating activity* pada periode ke-t

$$DAC_{pt} = (TAC_{pt} / SALE_{pt}) - (TAC_{pd} / SALE_{pd}) \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana DAC_{pt} adalah *discretionary accruals* pada periode tes, TAC_{pt} adalah *total accruals* pada periode tes, $SALE_{pt}$ adalah penjualan pada periode tes, TAC_{pd} adalah *total accruals* pada periode dasar dan $SALE_{pd}$ adalah penjualan pada periode dasar.

Setiap akuntan harus menyiapkan beberapa hitungan akhir tahun dan neraca-neraca keuangan untuk menjelaskan hasil kegiatan agar diketahui jumlah pertambahan pada barang milik serta penentuan kadar zakat mal dan lain-lain, Surat Al Mulk ayat 14, (Syahatah, 2001:180)

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui? (Al-Mulk:14)

Berdasarkan ayat ini, akuntan tidak boleh berpaling dari kaidah-kaidah akuntansi yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah. Ruang lingkup ijtihad hanyalah dalam masalah atau sekitar cara, metode, dan prosedur akuntansi itu saja.

Orang yang menyiapkan laporan keuangan harus bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya, seperti yang dijelaskan Surat Al Qashash ayat 26,

.... يَتَأْتِ اسْتَعْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al Qashash:26)

Akuntansi islam berlandaskan akhlak baik, karena akuntan yang melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat jujur, netral, adil, dan professional, supaya setiap kliennya merasa tenang terhadap harta hingga merasa tenang terhadap dokumen-dokumen penting dan informasi-informasi detail yang diterimanya dari akuntan. Jika akuntan yang memberikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsuan data, penipuan, pembodohan dianggap penghianat terhadap amanah yang diterimanya sebagai orang yang

dipercaya untuk menyusun laporan keuangan seperti yang ditegaskan oleh Hadist Rasulullah,

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi yang janjinya tidak bisa dipegang (yang tidak tepat janji).” (HR Ahmad) (Syahatah, 2001:181)

Juga, seperti yang dijelaskan Surat Yusuf ayat 55,

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Yusuf:55)

Gagalnya akuntan memberi informasi-informasi yang jujur bagi administrasi keuangan adalah lemahnya aspek akidah dan akhlak para akuntan itu.

Dan dijelaskan juga pada Surat Ar Rahmaan ayat 9,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Ar Rahmaan:9)”

Di dalam akuntansi secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan. Adapun secara khusus ialah bahwa keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah surat At Taubah ayat 119: (Syahatah, 2001:182-183)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”(At Taubah:119)

Selanjutnya, Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya Al-Furqaan ayat 72,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Al Furqaan:72)

Selama pihak pelaksana penghitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersikap jujur, selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Hal ini yang disyaratkan Allah dalam ayat tentang utang-piutang dan pembukuan harta dalam Al Qur'an, yaitu firman-Nya,

“... dan janganlah kamu merasa jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan labih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...” (Al Baqarah:282)

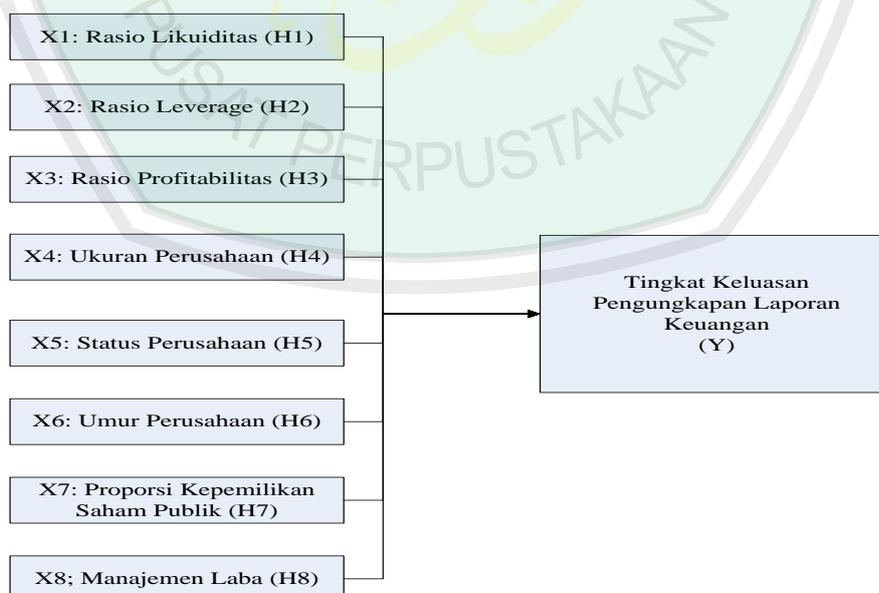
Sebaliknya, ketika seorang akuntan berlaku tidak jujur serta adanya pemihakan hanya untuk kepentingan sekelompok orang, ia telah melakukan pemalsuan dan penghianatan terhadap amarah. Untuk hal ini, Rasulullah telah memperingatkan kita dalam salah satu hadistnya,

“Kiamat yang besar ialah kamu berkata kepada saudaramu tentang sesuatu yang dia percaya kepadamu, sedangkan kamu (dengan ceria itu) berdusta kepadanya.” (HR Ahmad)

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian mengenai variabel dependen dan independen sebelumnya, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik-karakteristik perusahaan diwakili oleh rasio likuiditas (*current ratio*), rasio leverage (*debt to equity ratio*), rasio profitabilitas (*return on asset*), ukuran perusahaan ($L_n = \text{total aset}$), status perusahaan (variabel dummy), umur perusahaan, proporsi kepemilikan saham publik, dan manajemen laba. Sedangkan variabel yang menjadi fokus penelitian yaitu tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan. Pengaruh karakteristik perusahaan dan manajemen laba tersebut terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di LQ45 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah peneliti, 2013

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Rasio Likuiditas dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung melakukan pengungkapan informasi secara sukarela yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel Cooke (1989) dalam Fitriani (2001:79). Perusahaan yang likuiditasnya baik cenderung lebih berani mengungkapkan informasi lebih banyak. Hal itu berdasarkan pada perusahaan yang likuiditasnya tinggi berarti kondisi keuangannya juga baik, sehingga jika informasi itu diketahui oleh publik maka akan menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus pula. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Rasio likuiditas berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.2 Rasio Leverage dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Rasio leverage menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi maka menanggung biaya pengawasan yang tinggi pula. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Menurut Schipper (1981) dalam Marwata (2001:102), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi lebih secara sukarela. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Rasio leverage berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.3 Rasio Profitabilitas dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan

ekuitas. Singvi dan Desai (1971) dalam Subiyantoro (1996:89) menyatakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela karena ingin menunjukkan kepada publik dan stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.4 Ukuran Perusahaan dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan struktur kepemilikannya. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi secara sukarela lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Terdapat beberapa argumen yang dapat menjelaskan mengapa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Menurut Meek et. al. (1995) dalam Fitriani (2001:91),

kemampuan perusahaan besar untuk merekrut karyawan yang ahli serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis membuat perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan secara sukarela yang lebih luas daripada perusahaan kecil. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.5 Status Perusahaan dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Menurut Susanto (1992:86) afiliasi suatu perusahaan dengan perusahaan asing atau multinasional mungkin akan memiliki pengungkapan yang lebih tinggi daripada yang tidak berafiliasi. Perusahaan berstatus asing (PMA) diperkirakan mengungkapkan informasi secara sukarela lebih luas dibanding perusahaan domestik (PMDN). Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Perusahaan berstatus asing (PMA) memiliki tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan berstatus domestik (PMDN).

2.4.6 Umur Perusahaan dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Umur perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan berdasarkan kriteria lamanya perusahaan tersebut listing di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan di bursa. Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Semakin lama perusahaan maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.7 Proporsi Kepemilikan Saham oleh Publik dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Proporsi kepemilikan saham publik mewakili persentase saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan saham perusahaan, perusahaan diekspektasikan akan mengungkapkan informasi sukarela lebih banyak yang bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan. Naim dan Rakhman (2000:95) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan,

semakin banyak juga detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin lengkap (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004:371). Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H7: Proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh publik berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

2.4.8 Manajemen Laba dan Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan

Konsep Manajemen laba (*Earning Management*) dapat dimulai dari pendekatan agensi dan *signaling theory*. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa praktik *earning management* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan agen (manajemen) dan principal (pemilik) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya. Teori sinyal (*signaling theory*) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sinyal apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak. Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor.

Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih

cepat dibandingkan pihak eksternal. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menggunakan informasi sebagai usaha untuk memaksimalkan kepentingannya. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H8: Manajemen Laba berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan tahunan.

